

## ABSTRAK

### PERSEPSI KELOMPOK USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP SIMPAN PINJAM BAGI PEREMPUAN (SPP)

(Lana Ikbal Surahman, Adelina Hasyim, Nunisca Nurmalisa)

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis Persepsi Kelompok Usaha Kecil Menengah Terhadap Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian fenomenologis. Instrumen pengumpul data menggunakan panduan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model* yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan SPP dalam peminjaman modal usaha sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, terutama dalam tahapan tata cara peminjaman modal usaha, proses verifikasi kelompok usaha kecil menengah, dan pencairan dana.

**Kata kunci : koperasi SPP, modal, pelayanan, pembinaan, pengembangan usaha.**

**ABSTRACT****SMALL AND MEDIUM BUSINESS COMMUNITY'S PERCEPTION  
TOWARDS SAVINGS AND LOAN SERVICE FOR FEMALES  
IN BRANTI, NATAR, LAMPUNG SELATAN  
2014**

(Lana Ikbal Surahman, Adelina Hasyim, Nunisca Nurmalisa)

This research was intended to explain and to analyze small and medium business community's perception towards savings and loan service for females. Descriptive method in qualitative approach was applied in this research. This research used phenomenological research. Data collecting instrument used interview, observation, and documentation. The data analysis was analyzed by using Analysis Interactive Model to through collecting data, reducing data, serving data, and hypothesis testing. The result of the research showed that SPP had run the existing procedural loan service appropriately in terms of financial capital loan, business verification, and fund disbursement.

**Key words:** business development, cooperation of SPP, development, financial capital, service.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan dan menjadi persoalan yang besar bagi perkembangan bangsa. Persoalan kemiskinan ini telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya perhatian khusus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan, karena lapangan pekerjaan semakin minim dan jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh pemerintah terhadap perlindungan masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara terbatas.

Kemiskinan jika tidak segera ditanggulangi atau ditangani secara khusus bisa menjadi ancaman suatu bangsa sebagaimana telah dijelaskan dalam Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat Mandiri “Bahwa kemiskinan adalah ancaman terhadap persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa, oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan dari bumi Indonesia”. Keterlibatan Pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis, karena diperlukan suatu kebijakan yang dapat melahirkan suatu program atau kegiatan pembangunan secara terpadu antarpertumbuhan dan pemerintah, termasuk didalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Sebagaimana komitmen atau kesepakatan dalam implementasi kesejahteraan rakyat sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam deklarasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adapun komitmennya sebagai berikut:

Melihat kesejahteraan sosial Indonesia, sudah semestinya jika para Pemimpin atau Pemerintah pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk menengok kembali dan memperkuat konsep manajemen berdasarkan tujuan bernegara untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Negara tercinta ini. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sbagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang adil dan makmur, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” dan dipertegas

pada Pasal 34 Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Amandemen IV).” Ini berarti, kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *flatfrom system* perekonomian dan system kesejahteraan sosial di Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. “Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*.” Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Selama ini Pemerintah telah berupaya meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Mulai dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp100.000,00 per keluarga per bulan, sampai dengan pembagian kartu keluarga miskin (gakin) untuk kepentingan pengobatan gratis, dan berbagai program lain seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin).

Tetapi dalam tataran implementasi, program yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin itu tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru melahirkan tindakan korupsi gaya baru. Pemerintah menggunakan referensi ganda dalam mendata keluarga miskin baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, kedua lembaga pemerintah ini tidak mampu memberikan data warga miskin yang akurat sehingga dalam pelaksanaan program pemberdayaan rakyat miskin selalu menemui berbagai persoalan.

Kini pemerintah pusat menelurkan program baru yang sarannya bukan untuk masyarakat secara individu, tetapi membangun infrastruktur umum untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus memberdayakan semua masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Program ini dikemas lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini juga telah terlaksana di sejumlah daerah-daerah provinsi Lampung khususnya di Desa Branti Raya kecamatan Natar Lampung Selatan, untuk membantu perekonomian pedesaan di desa ini Program PNPM Mandiri meluncurkan Koperasi yang bernama Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) di bawah naungan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga permodalan untuk menghidupkan kembali Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Adapun contoh usaha kecil seperti usaha tani dengan tanah perorangan dan memiliki tenaga kerja, pedagang grosir, industri makanan dan minuman, alat rumah tangga, kerajinan tangan, peternakan dan koperasi skala kecil. Berdasarkan jenis usahanya, UKM dibedakan dalam 3 kategori. Yaitu manufaktur. Yakni jenis pekerjaan dengan mengubah bahan dasar menjadi produk yang bisa dikonsumsi atau digunakan pemakai. Misalnya toko furniture menghasilkan mebel atau perusahaan konveksi memproduksi pakaian. Berikutnya adalah usaha dagang. Pekerjaan ini menjual segala jenis produk kepada konsumen. Contoh toko kelontongan, toko kue basah dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah jasa. Biasanya berbentuk pelayanan. Misalnya pengiriman barang ke luar kota seluruh Indonesia, membuka warung internet dan lain sebagainya.

UKM yang berada di desa Bantiraya ada berbagai macam jenisnya mulai dari jasa, kerajinan tangan, pedagang sembako, pedagang sayuran, usaha rumah makan, dan industri rumah tangga opok singkong. Kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa Brantiraya rata-rata meminjam modal usaha untuk dapat bertahan dan berkembang. Adapun peminjaman modal usaha mereka melalui program PNPM mandiri pedesaan yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membuka Koperasi Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) sebagai upaya pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga. Koperasi ini memberikan modal usaha kepada setiap kelompok-kelompok usaha yang mengajukan atau meminjam modal untuk usaha. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang dengan sistem pembayaran gotongroyong yaitu apabila ada salah satu dari anggota kelompok tersebut belum bisa membayar cicilan perbulan dalam

melunasi peminjaman, di tanggung oleh anggota kelompok yang lain. Berikut ini disajikan data mengenai Kelompok Usaha Kecil Menengah di Desa Brantiraya Kecamatan Natar Lampung Selatan.

#### Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk memperkaya konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak dari pemerintah.

#### Kegunaan praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pengurus KUD (Koperasi Unit Desa), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dinas kecamatan terkait dalam menentukan kebijakan tentang pencapaian pemberantasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
2. Sebagai motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh peran masyarakat dalam program peminjaman modal usaha melalui Koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau lebih tepatnya Persepsi Kelompok Kecil Menengah terhadap Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Brantiraya Kecamatan Natar Lampung Selatan Tahun 2014.

Irwanto (2009:71) menyatakan bahwa “persepsi adalah proses yang diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa) sampai disadari dan dimengerti”.

Sebagaimana menurut Wainer dalam Bimo Walgito (2004:92) persepsi: Hubungan antara stimulus dengan proses itu bersifat mekanis, stimulus atau lingkungan akan sangat berperan dalam menentukan respon atau perilaku organisme (individu), respon yang diberikan oleh individu terhadap stimulus yang ada penyesuaian perhatian individu, suatu yang dipersepsi individu tergantung pada stimulus dan keadaan individu yang bersangkutan. Stimulus yang diberikan mendapat pemeliharaan dari individu tergantung kepada berbagai faktor, diantaranya adalah perhatian individu yang merupakan aspek psikologis dalam mengadakan persepsi.

persepsi seseorang sangat menentukan perilaku baik persepsi negatif terhadap objek yang dapat mengakibatkan motivasi yang salah atau kurang tepat bagi seseorang, sebaliknya persepsi yang positif terhadap suatu objek dapat

mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang. Begitu juga dalam kegiatan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang ada di Desa Brantiraya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan, ada berbagai macam persepsi yang timbul dari kelompok-kelompok usaha tersebut terhadap peminjaman modal usaha yang dilakukan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) melalui Koperasi Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) .

Dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakat pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meluncurkan PNPM Mandiri yang didalamnya ada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang memberi pinjaman lunak melalui Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat kurang mampu, khususnya para perempuan dan ibu-ibu rumah tangga agar dapat berwirausaha dan ikut menjaga kestabilan perekonomian keluarga. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang berakibat pada sikap yang buruk pada bantuan stimulus peminjaman modal usaha melalui Simpan Pinjam Bagi Perempuan (SPP) maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai persepsi usaha kelompok kecil dan menengah opak singkong terhadap Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan rancangan studi kasus. Sumber Data Penelitian Pemilihan informan penelitian ini dilakukan dengan tehnik sampling purposif, agar data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengambilan sampel bukan untuk memberikan saran dan pertanorm dimaksudkan untuk mewakili populasi, melainkan didasarkan kepada relevansi dan kedalaman informan serta didasarkan pada tema yang muncul dilapangan melalui tehnik purposif akan diperoleh informan kunci, dan dari informan kunci selanjutnya dikembangkan untuk mendapat informan lainnya dengan tehnik Sampel bola salju.

Pelaksanaan penelitian dan dilaksanakan :

1. Penelitian akan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan kunci, yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.
2. Sebelum melakukan survei langsung pada informan, penulis akan merancang terlebih dahulu daftar questioner yang akan terlebih dahulu akan diuji cobakan sebelum dilakukan penelitian terhadap responden yang menjadi subjek penelitian.
3. Jawaban dari responden akan dikelompokkan berdasarkan jawaban dari responden sampai titik jenuh, bila ada kekurangan akan dilakukan pengecekan ulang untuk melakukan perbaikan yaitu tentang persepsi kelompok usaha kecil menengah terhadap koperasi SPP, Prosedur pembentukan Koperasi SPP, program Koperasi SPP, usaha-usaha SPP dalam peningkatan mutu UKM yang ada di Desa Brantiraya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## **Metode penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif fenomenologis dengan rancangan studi kasus. Peneliti kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Mantja (2005:35), “prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang kata-kata, perilaku, sikap, atau suatu peristiwa atau kondisi”. Untuk mengungkapkan substansi penelitian, diperlukan pengamatan secara mendalam dengan latar yang alami dan data yang bukan berupa angka-angka, tetapi data berupa kata-kata, kalimat dan dokumen.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan informan sedemikian rupa dengan cara terlebih dahulu mewawancarai informan yang menjadi kunci. Data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui teknik; 1) wawancara, 2) pengamatan atau observasi, 3) studi dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini, namun diutamakan menggunakan teknik wawancara mendalam langsung dengan informan sedemikian rupa untuk dapat mengungkap makna yang tersembunyi dibalik fenomena dengan cara yang terlebih dahulu mewawancarai informan yang menjadi kunci. Adapun teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi dan dokumentasi dipergunakan guna membantu, memperkaya serta melengkapi data penelitian yang diperlukan yang ada di objek penelitian tersebut.

## **Analisis Data**

Berdasarkan wawancara dari informan penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif, guna untuk mengungkapkan persepsi kelompok usaha kecil menengah terhadap SPP di Desa Brantiraya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Analisis data kualitatif berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku dilapangan. Analisis data dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena serta hubungan keterkaitannya. Data dalam penelitian kualitatif menurut Patton terdiri atas; 1) deskripsi yang rinci (*detailed quotation*) tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pikirannya, serta dokumen-dokumen. Sedangkan menurut Miles dan Huberman data kualitatif terdiri dari banyak kata-kata dan bukan angka-angka yang deskripsinya memerlukan interpretasi sehingga dapat diketahui makna dari kata-kata tersebut, sehingga dalam analisis data harus dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data.

Dengan demikian, data atau informasi yang dikumpulkan yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian akan dianalisis berupa pengelompokan dan



pengkatagorian data dalam aspek-aspek yang telah ditentukan, hasil pengelompokkan tersebut dihubungkan dengan data yang lainnya untuk mendapatkan suatu kebenaran penelitian tersebut. Selanjutnya Sugiono dalam metodologi penelitian pendidikan dan sosial “analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi,wawancara, transkrip dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kesintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data yakni proses reduksi data, dan penarikan kesimpulan sementara dilakukan selama pengumpulan data masih berlangsung, sedangkan untuk verifikasi data dan penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Adapun tehnik analisis data dalam penelitian adalah tehnik induktif-konseptualistik yaitu berdasarkan informasi empiris yang diperoleh dibangun suatu konsep atau proposisi kearah pengembangan suatu teori substantif.

#### A. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi dan temuan penelitian maka dibuatlah pembahasan terhadap masing-masing objek penelitian yaitu sebagai berikut:

##### 1. Usaha Kecil Menengah (UKM)

UKM atau usaha kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usahanya berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 maka pengertian usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Di Indonesia, *UKM atau usaha kecil Menengah* adalah tulang punggung ekonomi Indonesia tetapi akses ke lembaga keuangan seperti perbankan sangat terbatas, walaupun banyak program bantuan keuangan pemerintah yang di peruntukan bagi UKM atau usaha kecil Menengah tapi tidak terjangkau UKM atau Usaha Kecil Menengah di karenakan sulitnya menembus akses perbankan terutama bagi usaha yang baru atau di daerah. Pemerintah Indonesia, membina ukm atau usaha kecil Menengah melalui Dinas Koperasi dan ukm, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Di desa Branti Raya juga terdapat berbagai macam jenis usaha mulai dari jenis usaha kecil hingga industri rumahan, sehingga dibutuhkan suatu badan peminjaman modal usaha agar dapat terus berkembang

dan maju bersaing dalam dunia usaha, terdapat 5 jenis usaha yang terdapat Di Desa Branti Raya termasuk dalam kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM). Usaha kecil menengah tersebut masuk dalam daftar peminjaman modal usaha melalui kegiatan SPP, tetapi pengetahuan tentang jaminan ekonomi yang layak dari pemerintah sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 ayat (2) tergolong rendah.

## 2. Koperasi Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP)

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Terdapat dua unsur yang paling berkaitan satu sama lain dalam koperasi setidaknya. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial.

UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Maksud dari "usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 itu adalah koperasi. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat koperasi.

Menurut jenisnya SPP termasuk dalam jenis koperasi jasa yang bergerak dalam peminjaman modal usaha, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang variabel yang diteliti yaitu persepsi kelompok usaha kecil menengah terhadap simpan pinjam bagi perempuan (SPP) di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelayanan yang dilakukan SPP terhadap kelompok usaha kecil menengah dalam ketentuan peminjaman modal usaha sudah sesuai dengan prosedur dan proses yang berlaku. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok usaha kecil menengah dalam peminjaman modal usaha kepada koperasi SPP sebagai berikut :

- a. Membentuk kelompok usaha (masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang)
  - b. Mengajukan proposal jenis usaha kelompok tersebut
  - c. Menyertakan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing anggota
  - d. Menyertakan surat rekomendasi persetujuan dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tingkat desa dan Kepala Desa setempat.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh SPP sebagai wujud kepedulian koperasi terhadap kelompok usaha kecil menengah agar usaha dapat maju dan berkembang melalui fasilitator UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di desa-desa pada kenyataannya kurang berfungsi maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang mempunyai otoritas dan terlibat dalam koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Branti Raya khususnya, dan di Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya yaitu sebagai berikut.

### **1. Kepada Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP)**

Sebagai salah satu bentuk Koperasi yang bergerak dalam bidang peminjaman modal usaha, diharapkan lebih berupaya untuk mencari kelompok-kelompok yang membutuhkan dana melalui analisis kredit modal bagi kelompok usaha perempuan yang ada di desa-desa, khususnya di desa Branti Raya. Koperasi diharapkan lebih mengoptimalkan lagi mutu pelatihan, pembinaan dan monitoring yang dilakukan pihak SPP terhadap kelompok usaha kecil menengah, agar kelompok-kelompok usaha kecil menengah tersebut dapat terus berkembang dan bersaing dalam dunia usaha yang dijalani.

### **2. Kepada Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Kreatifitas kelompok usaha kecil menengah hendaknya lebih dikembangkan agar dapat meningkatkan mutu usaha yang dijalani sehingga dapat bersaing dengan para pelaku usaha lain. Para pelaku usaha kecil diharapkan lebih aktif dalam pencarian informasi tentang prosedur peminjaman dan pemulangan modal usaha kepada SPP, serta informasi tentang program-program atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan SPP agar dapat menunjang pengembangan dan kemajuan para pelaku usaha kelompok-kelompok tersebut.

**DAFTAR RUJUKAN**

Irwanto. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mantja. 2005. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.

Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Sikap*. Bandung: Bina Cipta.